

KERJASAMA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA¹

INDONESIA AND AUSTRALIA COOPERATION IN IMPROVING EDUCATION IN INDONESIA

Vionita Rondonuwu², Michael Mamentu³, Trilke E. Tulung⁴
Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial
dan Politik
Universitas Sam Ratulangi, Manado
email : aenntvio@gmail.com

ABSTRAK

Untuk mencapai standar pendidikan nasional di Indonesia, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia merancang serta mempersiapkan program pengembangan pendidikan untuk peningkatan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini akan mengidentifikasi factor pendorong apa saja yang mendorong mengapa sampai saat ini Australia masih memberikan bantuan dibidang pendidikan untuk Indonesia serta program kerjasama sama apa yang sudah dilakukan kedua negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui berbagai referensi dari sumber tertulis terkait dengan focus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan kerjasama bilateral yang dilakukan kedua negara begitu baik dikarenakan ada kepentingan-kepentingan dari kedua negara yaitu Pemerintah Australia juga Pemerintah Indonesia. Program-program yang telah dan sementara dilakukan oleh kedua negara juga banyak menguntungkan kedua negara ini, terutama program kerjasama dalam bidang pendidikan.

Kata kunci : Pendidikan Indonesi; Kerjasama Bilateral; Bantuan Pendidikan

ABSTRACT

To achieve national education standards in Indonesia, the Government of Indonesia and the Australian Government designed and prepared educational development programs for improving education in Indonesia. This research will identify what driving factors are driving why Australia has still provided assistance in the field of education for Indonesia and what cooperation programs have been carried out by the two countries. The method used in this study is through various references from written sources related to the focus of research. The results of the study show that the bilateral cooperation carried out by the two countries was very good because there were interests from both countries, namely the Australian Government and the Indonesian Government. The programs that have been and are being

¹ Merupakan skripsi penulis

² Penulis, mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP UNSRAT

³ Staf pengajar FISIP UNSRAT, selaku pembimbing 1

⁴ Staf pengajar FISIP UNSRAT, selaku pembimbing 2

carried out by both countries have also benefited these two countries, especially cooperation programs in the field of education.

Keywords: Indonesian education; Bilateral Cooperation; Educational assistance

Pendahuluan

Masalah keamanan dan keselamatan negara merupakan kepentingan nasional yang paling utama bagi setiap negara, masalah ini menjadi landasan bagi setiap negara yang akan membuat suatu kebijakan politik luar negeri terhadap negara lain. Suatu kebijakan yang akan dibuat oleh negara pasti akan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut perlindungan terhadap negara, serta keamanan nasionalnya. Sama halnya Australia, dalam mengambil suatu kebijakan akan mempertimbangkan kepentingan nasionalnya. Indonesia dan Australia memiliki hubungan bilateral yang baik. Salah satu faktor yang paling mendukung kerjasama ini merupakan letak geografis ke dua negara yang berdekatan dan adanya prioritas keinginan yang sama untuk mewujudkan kawasan yang damai, stabil dan makmur. Kedua negara telah bekerja sama untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut dan meningkatkan kerjasama dalam bidang tertentu seperti kerjasama yang mengkaitkan tentang masalah lingkungan hidup yakni bencana alam, ancaman kejahatan serta pendidikan.

Indonesia adalah negara kaya akan alam dan budaya, namun semua itu menjadi percuma ketika kita sebagai warga negara Indonesia tidak mampu memanfaatkan kekayaan yang dimiliki. Karena kurangnya tenaga, kemampuan untuk mewujudkan hal tersebut, dan karena negara kita tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan negaranya sendiri atas keterbatasan sumber daya manusia. Suatu negara melakukan kerjasama dengan negara lain, disebabkan negara tersebut tidak dapat mencukupi setiap kebutuhan negaranya sendiri. Melihat dari realita yang terdapat di tiap-tiap negara, baik negara maju maupun berkembang, keunggulan suatu negara tidak hanya bertumpu pada kekayaan alam yang dimiliki, melainkan pada keunggulan atas sumber daya manusia SDM, yaitu tenaga terdidik yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang sangat cepat. Untuk mencapai standar pendidikan nasional di Indonesia, Pemerintah Indonesia dan Australia merancang dan mempersiapkan program pengembangan pendidikan dengan badan Australia untuk pengembangan Internasional atau *Australian Agency for International Development* (AusAID) yang telah melalui proses konsultasi dengan Departemen Pendidikan Nasional (DPN), Departemen Agama (Depag), Departemen Keuangan (Depkeu), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk membangun rencana strategis dalam mencapai prioritas utama yakni peningkatan akses bagi pendidikan dasar, peningkatan kualitas dan standar dan penguatan tata kelola pendidikan dan mekanisme akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Australia memberikan bantuan kepada Indonesia melalui kerjasama kedua negara untuk peningkatan pendidikan di Indonesia dan untuk mengetahui hasil dan dampak dari bantuan yang diberikan Australia untuk Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Luar Negeri

Sementara Howard Lenthal (dalam Jackson 2016 : 442), mengatakan bahwa kebijakan luar negeri mencakup tiga elemen dasar dari setiap kebijakan yaitu penentuan tujuan yang

hendak dicapai (*selection of objective*) pengarahannya sumber daya atau instrumen untuk mencapai tujuan tersebut (*mobilization of means*) dan pelaksanaan (*implementation*) dari kebijakan yang terdiri dari rangkaian tindakan dengan secara actual menggunakan sumber daya yang sudah ditetapkan.

Kerjasama Internasional

Menurut K.J Holsti (1987), kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan, atau dipenuhi oleh semua pihak.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Persetujuan atau masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Menurut Dougherty (1997) kerjasama Internasional adalah:

“Kerjasama telah digambarkan sebagai suatu perangkat hubungan yang tidak didasarkan pada paksaan atau tekanan dan itu disahkan oleh persetujuan yang timbal balik oleh negara-negara anggota boleh mengembangkan hubungan secara kerjasama sebagai hasil keanggotaan mereka didalam organisasi internasional. Dan didalamnya memasukkan seperti disetujui aturan, peraturan, norma-norma, dan prosedur pengambilan keputusan, dimana negara mencari untuk memecahkan isu”

Kerjasama Indonesia dan Australia

a. Bidang Perdagangan

Nilai perdagangan Indonesia atas produk pertanian dan peternakan dengan Australia mencapai 12 miliar Dollar AS. Produk tersebut masih dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan dalam negeri yaitu Indonesia. Karena itu, kementerian perdagangan mendesain program jangka panjang yang berorientasi pada kemandirian pangan, sehingga tidak lagi bergantung kepada impor dari luar negeri.

b. Bidang Kesehatan

Australia berkomitmen untuk membantu pemerintah Indonesia dalam bidang kesehatan. Australia membantu memperkuat kapasitas Indonesia dalam menangani kasus HIV/AIDS melalui program kemitraan senilai 100 juta dolar Australia atau sekitar Rp. 800 miliar.

c. Bidang Ekonomi

Perdagangan dari dua – arah telah meningkat menjadi 25,2% selama tahun 2000-2002. Lebih dari 400 perusahaan dari Australia sedang melakukan perniagaan di Indonesia, mulai dari usaha pertambangan sampai dengan usaha telekomunikasi.

d. Bidang Pariwisata

Sejak awal 1970-an Indonesia telah menjadi tujuan utama wisata bagi warga negara Australia. Australia telah menjadi sumber wisatawan yang penting bagi Indonesia. Bali merupakan provinsi yang paling dikenal oleh wisatawan Australia.

e. Bidang Keamanan

Kerjasama pada bidang kemiliteran atau suatu bidang keamanan antara Indonesia dengan Australia dihentikan, sejak kemunculan masalah penyadapan Australia terhadap beberapa pejabat tinggi Indonesia. Selain di bidang kemiliteran, kerjasama yang dihentikan juga meliputi pertukaran data intelijen. Purnomo menegaskan bahwa, penghentian kerjasama itu sama sekali tidak merugikan Indonesia. Sebab, selama ini TNI tak pernah bergantung pada Australia.

f. Bidang Pembangunan

Program bantuan luar negeri pemerintah Australia telah membantu meningkatkan taraf kehidupan jutaan jiwa di negara-negara berkembang. Program bantuan ini mendukung kepentingan nasional Australia dengan berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan di negara-negara berkembang.

Australia dan Indonesia telah bermitra dalam pembangunan lebih dari 60 tahun. Kemitraan ini mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan infrastruktur dasar, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, serta memperkuat demokrasi, keadilan juga tata kelola pemerintahan.

g. Bidang Teknologi

Indonesia-Australia Digital Forum (IADF) sebagai bentuk komitmen kedua negara untuk melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi digital. IADF diharapkan mampu menjadi peluang meningkatkan dan memperluas kerjasama pemerintah serta swasta baik pada Indonesia dan Australia di sektor digital, serta sarana menambah wawasan, dan menciptakan ide baru.

h. Bidang Pendidikan

Dalam memajukan pendidikan di Indonesia Australia mempunyai program bantuan pembangunan luar negeri yaitu AusAID. AusAID merupakan agensi pembangunan di bawah Pemerintahan Australia, yaitu Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia. AusAID menyediakan bantuan pembangunan resmi untuk negara-negara berkembang, terutama di wilayah Asia-Pasifik dan Afrika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada penjelasan masalah secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data menelaah sejumlah literatur baik berupa buku-buku, jurnal, dokumen, surat kabar, makalah dan artikel yang terkait dengan masalah tersebut. Jenis data dalam penulisan ini yaitu jenis data sekunder, yang bersumber dari pengumpulan data yang penulis lakukan selama penelitian, yaitu dari berbagai sumber tertulis.

PEMBAHASAN

Pasang Surut Hubungan Indonesia dengan Australia

Sejak tahun 1942 dan seterusnya, Australia telah menjadi tuan rumah bagi pemerintah pelarian Hindia Belanda sementara, dan memberinya hak kedudukan administrative dan ekstra territorial militer. Lebih lagi, bersama mundurnya akibat gempuran Jepang, Belanda membawa serta ribuan orang Indonesia yang sebelumnya dipekerjakan di armada dagang Hindia Belanda, angkatan perang dan pegawai sipil, juga beberapa ratus orang bekas tawanan politik dari barak konsentrasi yang terkenal keji, Tanah Merah, Irian Barat. Semua orang Indonesia diizinkan memasuki Australia sebagai warga Negara Belanda.

Oleh karena itu, ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, Australia berubah dari “sebuah pangkalan dari mana daerah jajahan Belanda akan dipulihkan” menjadi sebuah papan loncatan yang potensial bagi tindakan militer Belanda untuk menindas Republik Indonesia yang belum berbentuk. Menjelang akhir tahun 1946, Menteri Luar Negeri Australia dengan senang mengumumkan di depan parlemen bahwa persoalan besar Indonesia dapat diselesaikan. Perundingan yang berlarut-larut antara wakil-wakil Belanda dan Republik Indonesia, dengan Komisaris Tinggi Inggris di Asia Tenggara, Lord Killearn, yang bertindak sebagai mediator, pada tanggal 15 November 1946 telah menghasilkan pamarafan Persetujuan Linggajati yang juga dikenal sebagai Persetujuan Cirebon. Dengan persetujuan tersebut, yang menandatangani secara resmi oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 1947, Pemerintah Belanda setuju untuk mengakui Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan *de facto* di Jawa, Madura dan Sumatra, serta bekerja sama dalam membangun, hingga 1 Januari 1949, negara federal yang berdaulat dalam lingkungan Uni Belanda-Indonesia. Tekanan baik dari Inggris maupun Amerika telah memaksa kedua lawan untuk menyetujui sebuah penyelesaian kompromis yang menurut perhitungan Australia memberi harapan besar. Menjelang akhir bulan Februari 1958, pemerintah pusat Jakarta mulai mengadakan operasi militer terhadap para pemberontak. Keberhasilan gerak yang dilakukan oleh pasukan pemerintah pusat yang dapat merebut kembali kota-kota yang dikuasai oleh PRRI di Sumatera maupun Permesta di Sulawesi tanpa menemukan perlawanan yang berarti. Hal ini mengakibatkan kekecewaan CIA, sehingga menghentikan bantuan yang diberikan kepada mereka. Kecepatan tentara Jakarta ini tentu saja mengejutkan para petinggi ketiga negara tersebut. Tampaknya dukungan dan pengiriman senjata-senjata yang diberikan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Australia terhadap para pemberontak, dirasa tidak cukup oleh para pemberontak. Kemudian Indonesia berhasil menumpas pemberontakan PRRI/ Permesta dan berakhir pada tahun 1961.

Berhasil ditumpasnya pemberontakan PRRI/Permesta tidak disambut optimis oleh Canberra, hal ini diakibatkan oleh pemberontakan tidak menghasilkan iklim yang menguntungkan perkembangan, ditinjau dari sudut pandang Canberra. Hubungan Australia dengan Indonesia mulai membaik sehubungan dengan pergantian pemerintahan di Indonesia.

Tujuan Australia membantu Indonesia

Tindakan Australia yang berupaya mendekatkan diri dengan memberikan bantuan dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk diplomasi publik dengan menggunakan soft power dimana *outcomes* yang diharapkan ialah mampu untuk mempengaruhi perkembangan pada madrasah. Sebagaimana dikatakan oleh Vuving bahwa ada tiga aspek yang akan menambah keefektifan *soft power* yaitu *benignity*, *brilliance* dan *beauty*.

Bahkan sampai saat ini, Australia masih saja menjalin kerjasama yang baik dengan Indonesia dikarenakan untuk kepentingan Australia. Sejak 2013 sampai saat ini dana bantuan luar negeri tidak lagi disalurkan lewat Australian Agency for International Development (AusAid), melainkan dikembalikan pengelolaannya lewat DFTA. Direktur AidWatch yaitu James Goodman mengatakan bahwa hal tersebut hanya untuk menguntungkan perusahaan Australia. James yang juga akademisi di University of Technology Sydney mengatakan bantuan Australia juga fokus pada kepentingan negaranya yang strategis seperti mengelola pencari suaka illegal, pusat penahanan pencari suaka di luar Australia, serta diplomasi ataupun ekonomi termasuk juga kesepakatan dagang.

Proyek Bilateral Australia untuk Indonesia

Program bantuan pembangunan luar negeri Pemerintah Australia merupakan program yang dibiayai Pemerintah Federal untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara-negara berkembang. Program ini dikelola oleh Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Australia (AusAID) yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Luar Negeri Australia.

Pemerintah Australia, melalui AusAID, dengan cara memakai perusahaan internasional untuk bantuan luar negeri Australia. Penggunaan perusahaan ini untuk menggunakan keahlian mereka untuk menyampaikan proyek bantuan dan melatih orang-orang local untuk melanjutkan program yang lama atau melanjutkan suatu proyek lama setelah kontrak tersebut telah berakhir. AusAID membiayai organisasi dan tidak berorientasi keuntungan, untuk menyampaikan program bantuan pada komunitas local tingkat di negara perkembangan. Sebagai suatu respon atas darurat, AusAID mengatur suatu kunjungan untuk lokasi yang terkena dampak untuk menyediakan dukungan secara langsung. Ini bisa dikatakan merupakan komunitas yang dihancurkan oleh badai dan gempa, atau pemulihan dari konflik.

Program Kerjasama Australia di Indonesia

Berbagai macam Program Kerjasama Australia di Indonesia sebagai berikut :

a. Konteks Pembangunan

Kemiskinan merupakan tantangan serius bagi Negara Indonesia. Tujuh persen dari 242 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan US\$1 per hari. penduduk miskin tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai, dan tingkat pengangguran melebihi 9 persen.

b. Governance

Governance yang baik merupakan akar sebuah pembangunan. Memperkuat *Governance* akan membantu Indonesia tumbuh dengan kemampuan untuk menangani masalah pengangguran, menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran nasional. Kegiatan-kegiatan itu menjadi prioritas bagi AusAID.

c. Indonesia-Australia *Technical Assistance Management Facility for Economic Governance* (TAMF III)

TAMF (The Indonesia-Australia Technical Assistance Management Facility for Economic Governance) atau Fasilitas Manajemen Bantuan Teknis untuk Tata Kelola Ekonomi Indonesia-Australia mulai dijalankan sejak tahun 1999, dan dalam dua tahap pertama menyediakan bantuan teknis senilai A\$19 juta melalui lebih dari 100

kegiatan di berbagai badan Pemerintah Indonesia.

d. *Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD)*

Persekutuan Indonesia Australia untuk Desentralisasi (AIPD) bertujuan menyokong ke pengurangan kemiskinan melalui meningkatkan pemerintahan lokal dan pengiriman jasa. Ini akan membangun pada sukses dari dukungan arus ke Indonesia sebelah timur, disediakan melalui Australia Bantuan Nusa Tenggara untuk Otonomi regional (ANTARA) program, yang akan berkesimpulan pada 2010. Dukungan AIPD akan memfokuskan pada umum perkuatan manajemen keuangan pada provinsial dan taraf daerah di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat.

e. *Government Partnerships Fund (GPF)*

Government Partnership Fund (GPF) adalah sebuah program lima tahun senilai AUD 50 juta untuk membangun kapasitas tata kelola ekonomi, keuangan dan sektor publik di Indonesia. Kegiatan-kegiatan GPF difokuskan pada membangun kapasitas tata kelola Indonesia dalam bidang ekonomi, keuangan dan sektor publik, dan prioritas-prioritas lain yang ditetapkan oleh Komisi Bersama.

f. *Infrastruktur dan Pinjaman*

Melalui dua inisiatif besar Proyek Peningkatan Jalan Nasional Indonesia Bagian Timur (Eastern Indonesia National Road Improvement Project) dan Program Pendidikan Dasar (Basic Education Program) Australia mendukung pengembangan ekonomi dan sosial regional dengan fokus pada wilayah Timur Indonesia. Proyek-proyek ini akan dibiayai melalui pinjaman lunak kepada Pemerintah Indonesia. Dari total pinjaman sejumlah AUD 500 juta yang tersedia, sebesar AUD 300 juta akan disediakan untuk perbaikan jalan nasional, sementara AUD 200 juta akan dialokasikan untuk pendidikan dasar.

g. *Program Rehabilitasi Aceh*

Setelah kehancuran hebat akibat bencana tsunami pada 26 Desember 2004, Pemerintah Australia membentuk *Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development (AIPRD)*, sebuah kemitraan selama lima tahun senilai AUD 1 milyar untuk membantu rekonstruksi dan pembangunan Indonesia di dalam dan di sekitar wilayah yang terkena dampak tsunami

h. *Kemitraan Australia-Indonesia (AIP)*

Tahun 2006-2007, Indonesia menjadi penerima Bantuan Pembangunan Resmi terbesar dari Australia. Tujuan program bantuan ini adalah untuk membantu mengurangi kemiskinan dan mencapai pembangunan ekonomi dan sosial yang berkesinambungan.

i. *Kemitraan Australia-Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (AIPRD)*

Sebagai bagian dari Kemitraan Australia-Indonesia, paket bantuan AIPRD melibatkan pejabat tertinggi di kedua pemerintahan untuk mendukung upaya rekonstruksi serta pembangunan Indonesia, baik di dalam maupun di luar wilayah yang terkena dampak tsunami.

j. *Pendidikan dan Beasiswa*

Pendidikan adalah landasan dasar bagi pembangunan, dan merupakan faktor penentu bagi penanggulangan kemiskinan. Perluasan dukungan bagi pendidikan dasar (tingkat sekolah dasar dan tingkat sekolah menengah pertama) merupakan sebuah unsur penting dari strategi kerja sama pembangunan yang disepakati antara pemerintah Australia dan Indonesia. Dukungan ini bertujuan untuk membantu Negara Indonesia dalam meningkatkan kualitas dari sistem persekolahan dasar dan menengah pertama sampai batas-batas tertentu.

Selain program-program tersebut, Australia dan Indonesia menjalin kerjasama mereka dalam bidang pendidikan seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop, keseluruhan dana bantuan yang disetujui adalah \$ 93 ribu (hampir Rp 1 miliar). Selain program UniBRIDGE, program yang dilakukan oleh Australia-Indonesia Institute lainnya adalah di bidang pendidikan, penelitian dan seni. Tiga program tersebut adalah kerjasama yang dilakukan Charles Darwin University di Darwin dengan mitra di Indonesia untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam program pengembangan profesional bagi guru-guru di Indonesia. Lewat program UniBridge mahasiswa Australia yang sedang mengambil mata kuliah Bahasa Indonesia bisa bertemu dan berkomunikasi secara online dengan teman-teman mereka dari Universitas Nusa Cendana (UNDANA) di Kupang.

Jumlah warga asal Indonesia yang sekarang menetap di Australia secara resmi adalah 63.159 orang, yaitu sekitar 0,3 persen dari keseluruhan penduduk Australia yang berjumlah 21 juta jiwa. Menurut statistik resmi Australia tahun 2011, angka ini menunjukkan peningkatan hampir 24 persen dari tahun 2006. Jumlah warga asal Indonesia di tahun 2006 adalah 50 ribu orang. Jumlah ini adalah mereka yang benar-benar menetap di Australia, belum termasuk mahasiswa yang jumlahnya mencapai belasan ribu orang. Data ini terungkap dari laporan terbaru yang dikeluarkan pemerintah Australia berjudul *The People of Australia*, yang membeberkan hasil sensus yang dilakukan di tahun 2011, dengan membandingkan sensus sebelumnya di tahun 2006. Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) juga menyetujui bantuan dana bagi empat proyek yang dilakukan Australia-Indonesia Institute untuk tahun 2017-2018. Salah satu proyek tersebut adalah program UniBRIDGE, yaitu program kerjasama antara mahasiswa Australia dan Indonesia di bidang pertukaran budaya dan bahasa lewat online.

PENUTUP

Kesimpulan

Kerjasama yang dijalin oleh kedua Negara adalah demi kepentingan nasional dari masing-masing Negara. Selama periode tahun 2004 bahkan sampai saat ini, Australia tampak konsisten menjalin kerjasama di bidang pendidikan dengan Indonesia. Melalui AusAID, Australia membantu pembangunan-pembangunan sekolah yang ada di Indonesia, pembangunan jalan-jalan, apalagi Indonesia yang rentan terkena bencana. Australia juga bekerjasama dengan Indonesia melaksanakan pelatihan jasa guru untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Bahkan sampai juni 2018, tercatat bahwa hampir 20 ribu mahasiswa yang sedang belajar di berbagai perguruan tinggi di Australia atau yang terbesar jumlahnya dibandingkan di negara-negara lainnya di dunia. Bantuan yang diberikan oleh Australia sebenarnya dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk investasi jangka panjang Australia untuk mempromosikan kepentingan nasionalnya sebagaimana yang dikatakan di dalam situs resmi DFAT bahwa bantuan yang diberikan ke tiap negara akan disesuaikan dengan kebutuhan negara dan mencerminkan kepentingan nasional Australia. Pasca terjadinya bom bali II pada tahun 2004, Australia kemudian menyadari bahwa tindakan radikalisme yang terjadi di Indonesia akan mengancam kepentingan nasional Australia yang sedang melakukan perubahan kebijakan dan berupaya untuk mendekatkan diri pada Asia. Untuk itu Australia kemudian mempersiapkan tindakan untuk mencegah berkembangnya radikalisme dengan memberikan bantuan di bidang pendidikan. Bahkan sampai saat ini Australia masih saja membantu Indonesia untuk kepentingan

negaranya yang strategis seperti mengelola pencari suaka ilegal, pusat penahanan pencari suaka di luar Australia, serta diplomasi ataupun ekonomi termasuk juga kesepakatan dagang, serta menguntungkan perusahaan yang ada di Australia.

Saran

Sebaiknya kerjasama yang terjalin dari kedua Negara bukan hanya dibidang pendidikan saja tetapi juga pada berbagai bidang lebih ditingkatkan lagi. Dikarenakan melihat adanya sejarah hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia yang terjadi pasang surut, keduanya harus menjaga hubungan baik. Selain untuk menjaga terjalinnya hubungan baik antara kedua Negara ini, kedua Negara juga akan saling mempercayai satu sama lain. Selain untuk kepentingan nasional kedua negara, hubungan kedua Negara yang akan terjalin baik ini akan meningkatkan banyak hal pada kedua Negara, terutama Indonesia dalam hal ini Indonesia masih menjadi Negara berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, Umar Suryadi, 2017, *Metode Penelitian Hubungan Internasional.*, Yogyakarta: Pustaka pelajar
- , 2017, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional.*, Depok: Kencana
- Critchley, Susan, 1995, *Hubungan Australia dengan Indonesia.*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Dougherty, James E dan Robert L. Pfaltzgraff, 1997, *Contending Theories.*, New York: Harper and Row Publisher
- Goldstein, Joshua dan Pevehouse Jon, 2003, *International Relations.*, : American University
- Holsti, K.J., 1987, *Politik Internasional, Kerangka Analisa.*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya
- Jackson, Roberth, dan Sorensen, George, 2016, *Pengantar Studi Hubungan Internasional.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jemadu, Aleksius, *Politik Global: Dalam Praktik dan Teori Edisi 2*
- John D. White, 1974, *The Politics of Foreign Aid.*, Sydney: The Bodley Head. London. Hal 188
- Margaret, George, 1980, *Australia And The Indonesian Revolution.* Melbourne: Melbourne University Press. hlm. 17.
- Tri Nuke, I Pudjiastuti, 2005, *Kebijakan Pertahanan Australia 2000-2005 dan Respons Negara-Negara Asia Timur dan Selandia Baru.*, Jakarta: LIPI Press, Anggota IKAPI

Internet :

- https://www.acamedia.edu/8413615/HUBUNGAN_BILATERAL_INDONESIA_DENGAN_AUSTRALIA, di akses pada 1 Mei pk. 14.22
- <http://digilib.unila.ac.id/19860/2/Bab%20II.pdf>, diakses pada februari tgl 19, pkl 18.55
- <http://eprints.uny.ac.id/13761/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada mei tgl 14, pkl. 22.05
- <http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/PB2010.html>, diakses 24 februari pkl. 15.10
- <http://eprints.uny.ac.id/21738/2/BAB%20II.pdf>, di akses pada 14 Mei pkl. 23.10
- <http://eprints.umm.ac.id/26064/2/jiptumpp-gdl-enifarida0-37134-2-babi.pdf>, di akses pada 15 Mei pkl. 01.35
- <https://Internasional.kompas.com>, diakses 8 maret pkl. 17.38

<https://www.kemlu.go.id/canberra/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/DUBES-KRISTIARTO-AJAK-MAHASISWA-INDONESIA-DI-AUSTRALIA--JADI-AGEN-PERUBAHAN-BANGSA.aspx> , diakses pada 11 maret, pkl 23.44

<https://www.kemlu.go.id/canberra/lc/Pages/Australia.aspx>, diakses pada 8 maret pkl 18.00

<https://www.liputan6.com/tekno/read/3246594/indonesia-dan-australia-jalin-kerja-sama-ekonomi-digital>, diakses pada 8 maret pkl 20,23

<https://m.detik.com/news/abc-australia/d-4262173/bagaimana-bantuan-australia-oleh-indonesia>, diakses pada 1 juni pk 21.08

Apakah Ausaid, Sumber : indo.ausaid.gov.au, diakses pada tgl 19 februari, pkl 20;08

Embassy goverment asutralia.2010.Kedutaan Besar Australia Indonesia, Jakarta, 2 November 2010.